



Media: Harian Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 30 November 2017

Halaman: 14

▶ MENARA KOMUNIKASI

# Korupsi Tower Sulit Diselidiki

**UMBULHARJO**—Kejaksaan Negeri Jogja kesulitan menyelidiki dugaan korupsi penyusunan Perda tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik.

Ujang Hasanudin  
ujang@harianjogja.com

"Kendalanya karena tidak ada keterbukaan dari Dewan," kata Kepala Kejaksaan Negeri Jogja, Arief Syah Mula Siregar, saat ditemui di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja, Rabu (29/11).

Arief mengatakan saat penyidik Kejaksaan meminta keterangan, sebagian besar anggota Dewan mengaku tidak mengetahui proses perizinan pendirian menara sampai proses penyusunan perda. Menurut dia, jika saksi dari Dewan mau membeberkan semua informasi terkait penyelenggaraan izin menara telekomunikasi semua akan cepat terungkap. "Tapi rata-rata menjawab tidak

▶ Kejaksaan Negeri Jogja menilai anggota DPRD tidak terbuka saat diselidiki.

▶ Pemilik menara bukanlah provider melainkan pihak ketiga yang menyewakan menara tersebut kepada perusahaan telekomunikasi.

tahu," ujar Arief. Kendati demikian, mantan Asisten Pidana Khusus Bangka Belitung ini masih terus menyelidiki kasus tersebut. Tidak hanya memanggil saksi, penyidik juga turun langsung ke lapangan untuk pengecekan lapangan. Dari pemeriksaan ini, dia baru mengetahui pemilik menara bukanlah provider melainkan pihak ketiga yang menyewakan menara tersebut kepada perusahaan telekomunikasi.

Sejak kasus tersebut diselidiki akhir Agustus lalu, sudah banyak saksi yang diperiksa dari unsur Pemerintah Kota Jogja dan Dewan. Sebagian anggota Dewan yang diperiksa adalah anggota Pansus Perda Menara, sekretariat Dewan. Dugaan korupsi itu mencuat karena ada kebijakan pembatasan izin pendirian menara,

faktanya menara baru terus bermunculan. Dari data Dinas Perizinan dan Penanaman Modal hanya ada 104 menara telekomunikasi yang berizin. Sementara jumlah menara yang ada sekitar 222 menara. Artinya ada 118 menara ilegal. Arief menyatakan jika dalam proses penyelidikan lapangan ditemukan bukti baru pihaknya tidak menutup kemungkinan akan memanggil kembali sejumlah saksi termasuk mantan anggota Pansus menara.

Ketua DPRD Kota Jogja, Sujanarko menampik disebut tidak kooperatif dalam kasus tersebut. Ia mengatakan dirinya bersama sejumlah anggota Dewan sudah menyampaikan informasi apa adanya saat menjadi saksi. Jika ada anggota Dewan yang tidak mengetahui apa yang ditanyakan penyidik, dia mengatakan hal itu dapat terjadi karena tidak semua anggota Pansus memahami utuh proses penyusunan perda menara. "Kalau ada pertanyaan penyidik dijawab tidak tahu mungkin ya tidak tahu beneran," kata dia.

Sujanarko menyatakan ketidaktahuan saksi dari Dewan dalam menjawab pertanyaan penyidik tidak bisa disimpulkan kurang

**Dugaan Korupsi Tower**

- Perda No72017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik diadukan 17 Juli 2017.
- Hingga kini sejumlah menara yang tidak berizin belum juga ditertibkan.
- Hanya ada 104 menara telekomunikasi yang berizin.
- Total ada 222 menara di Kota Jogja.

Tindak Lanjut

- Untuk Ditanggapi
- Untuk Diketahui
- Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum 2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 3. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005